

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menciptakan perekonomian yang kuat adalah cita-cita semua negara, dan untuk mencapai hal tersebut, negara harus melakukan banyak upaya, salah satunya adalah mengatasi masalah sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi suatu negara dapat dilihat dari banyak tidaknya jumlah tenaga kerja yang menganggur. Jika terdapat banyak pengangguran, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam negara tersebut dan menandakan bahwa negara tersebut memiliki masalah dalam sektor ketenagakerjaan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dengan populasi penduduk yang tinggi. Jumlah populasi penduduk yang tinggi membuat Indonesia menyebabkan berbagai masalah, salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran (*unemployment*) adalah suatu kondisi dimana seorang yang masuk dalam angkatan kerja dan secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak memperoleh pekerjaan tersebut (Rambe, Prihanto dan Hardini, 2019). Pengangguran terjadi karena adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja di berbagai sektor. Negara-negara berkembang menghadapi kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan berkembang dengan pesat dapat menyebabkan timbulnya beberapa masalah baru, salah satunya adalah masalah pengangguran. Jika tidak ditangani dengan baik,

masalah pengangguran akan semakin memburuk karena jumlah penduduk yang terus meningkat, sementara kesempatan kerja baru terbatas.

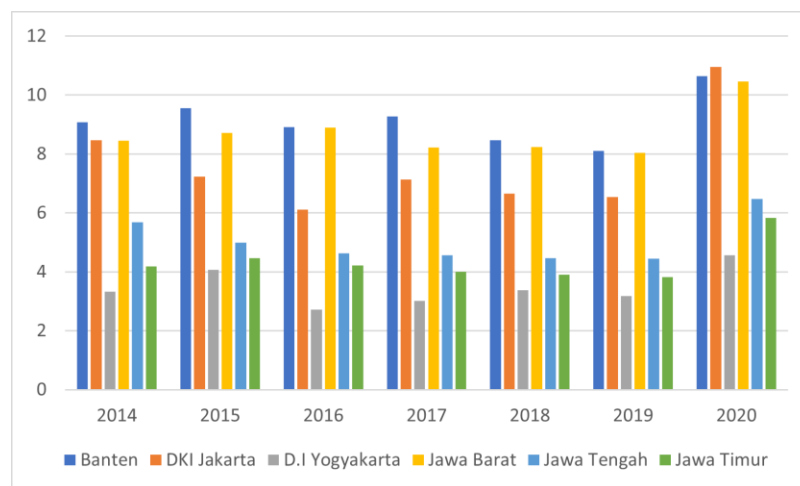
Istilah pengangguran didefinisikan sebagai seseorang yang masuk dalam kategori angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja merupakan seseorang yang sudah pantas untuk mencari pekerjaan dengan rentang usia 15 sampai 65 tahun dan mempunyai keinginan untuk bekerja, hanya saja kondisi yang membuat sulit mendapatkan pekerjaan (Indayani dan Hartono 2020).

Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, individu dan masyarakat, seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai. Dampak mengangguran terhadap masyarakat seperti menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan. Pengangguran disebabkan karena kuantitas penawaran tenaga kerja pada pasar lebih besar dibandingkan dengan kuantitas tenaga kerja yang diharapkan pada saat itu (Ninie, 2022).

Menurut Mankiw (2018), pengangguran adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan, dimana ia dulu pernah bekerja dan telah diberhentikan. Masalah pengangguran menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena pengangguran sangat berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan (Cang dan Wu, 2012). Tingkat pengangguran menjadi indikator dalam mengukur kemajuan suatu daerah. Daerah dengan tingkat pengangguran tinggi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian daerah tersebut buruk.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran dalam angkatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu presentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pengangguran tidak hanya menjadi masalah di lingkup nasional, tetapi juga di lingkup regional. Salah satunya terjadi pada Provinsi di Pulau Jawa. Berikut tabel yang menunjukkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Pulau Jawa per Agustus tahun 2014-2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2014-2020

Berdasarkan gambar 1.1 diatas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa pada tahun 2014-2020 dapat dikatakan tinggi. Dapat dilihat bahwa Provinsi Banten adalah Provinsi dengan jumlah pengangguran terbuka terbesar di setiap tahunnya. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan sebagai Provinsi yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran terbuka, meskipun rata-rata

pada tahun 2020 tingkat pengangguran provinsi mengalami kenaikan yang signifikan.

Hal ini menjadi masalah serius bagi pemerintah, karena semakin banyaknya jumlah pengangguran, maka menunjukkan ketidakmampuan pemerintah melakukan dua hal yaitu kegagalan untuk memperluas kesempatan kerja dan kegagalan menerapkan sistem pendidikan yang tidak bertumpu pada pengetahuan saja tetapi mengembangkan atau melatih kemampuan bersaing di dunia kerja. Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi dan mencegah naiknya tingkat pengangguran.

Permasalahan pengangguran di Pulau Jawa masih tergolong tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang berada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, satu diantaranya yaitu teknologi yang berkembang pesat. Teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari proses globalisasi yang telah menguasai seluruh wilayah dunia termasuk Indonesia. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan memiliki dampak secara positif maupun negatif bagi tenaga kerja. Hal ini juga berdasarkan penelitian (Wahyuni, 2019) yang mengemukakan bahwa teknologi mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, yang dimana semakin tinggi teknologi maka semakin menurun tingkat partisipasi angkatan kerja karena posisi para pekerja digantikan oleh teknologi yang berkembang pesat. Menurut data dari *Human Development Indeks*, dari segi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia berada pada peringkat 108 di dunia. Rendahnya sumber daya manusia di Indonesia diakibatkan kurangnya

kompetensi IPTEK, karena sikap mental dan kompetensi IPTEK yang dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. (Sutrisno, 2017)

Menurut BPS (2015) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah. Nilai IP-TIK secara tidak langsung dapat mengukur kesiapan suatu wilayah atau negara menuju era masyarakat informasi (*Information Society*).

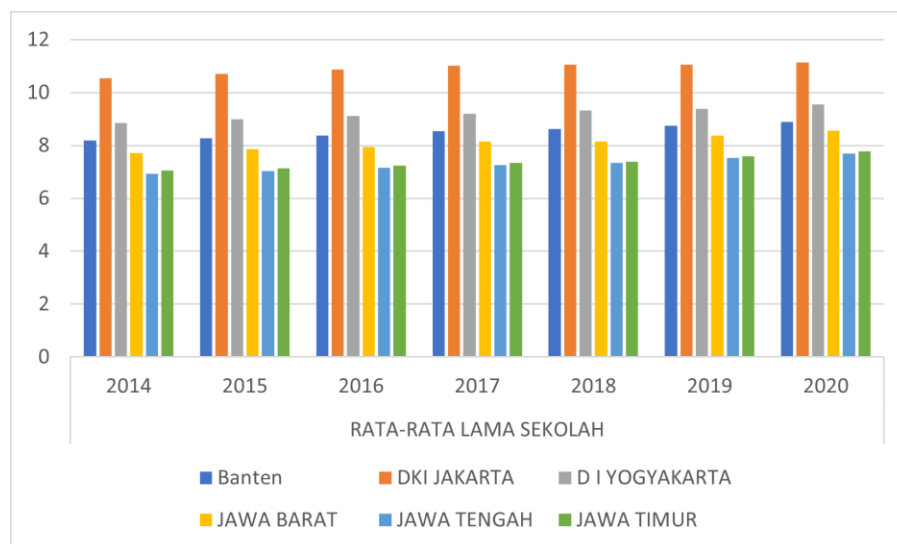
Tabel 1.1 Perkembangan IP-TIK di Indonesia Tahun 2014-2020

Subindeks	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Akses & Infrastruktur	5.39	4.81	4.88	5.09	5.34	5.53	5.67
Penggunaan	2.73	2.21	3.19	4.44	4.45	4.85	5.34
Keahlian	6,73	5.38	5.54	5.75	5.76	5.84	5.92
IP-TIK	4.59	3.88	4.34	4.96	5.07	5.32	5.59

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada saat ini, dunia sudah memasuki era digital. Menurut (Pramana, 2019) Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) sudah menjadi faktor penting dalam kemajuan suatu wilayah. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) telah menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, yang terlihat dari meluasnya dampak pemanfaatan dan pemberdayaan penerapan metode produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang lebih efisien.

Dilihat dari tabel diatas, perkembangan IP-TIK di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015 nilai IP-TIK mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya peningkatan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini juga menjadi fokus untuk para tenaga kerja untuk mengikuti arus perkembangan zaman dengan terus mengasah keahlian dan keterampilan agar para pekerja tidak tergantikan oleh teknologi yang terus berkembang pesat.

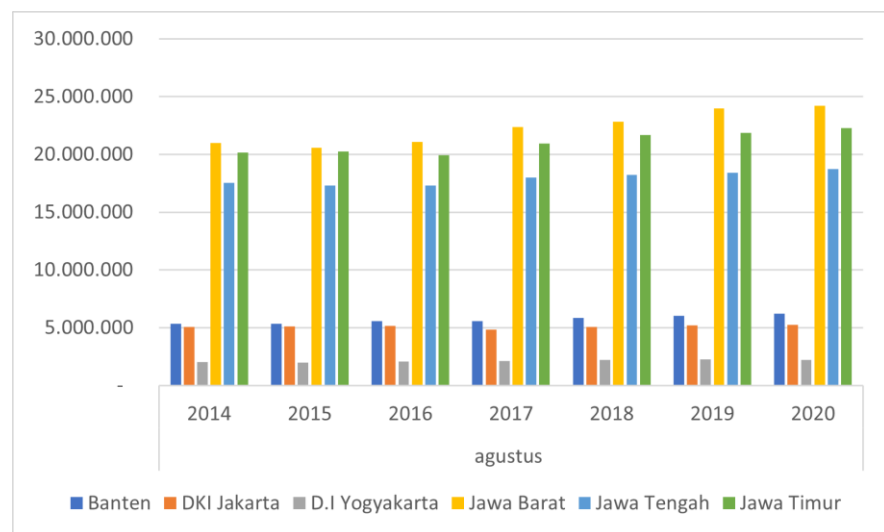


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.2 Tingkat IP-TIK di Pulau Jawa Tahun 2014-2020

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat jelas bahwa data IP-TIK di Pulau Jawa pada tahun 2014-2015 dikatakan memiliki presentase yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur di Pulau Jawa dapat mendukung terjadinya peningkatan penggunaan internet serta adanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai (Widyawati, 2021).

Indikator lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah situasi yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok penduduk dalam kelompok umur tersebut (Mulyadi, 2003). Laju pertumbuhan penduduk yang besar akan menghasilkan jumlah angkatan kerja yang besar juga. Besarnya angkatan kerja diharapkan dapat menunjang kenaikan kegiatan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. Tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan akan menyebabkan penciptaan lapangan kerja yang tersedia sangat rendah, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya menimbulkan pengangguran.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 3 Angkatan Kerja pada Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2020

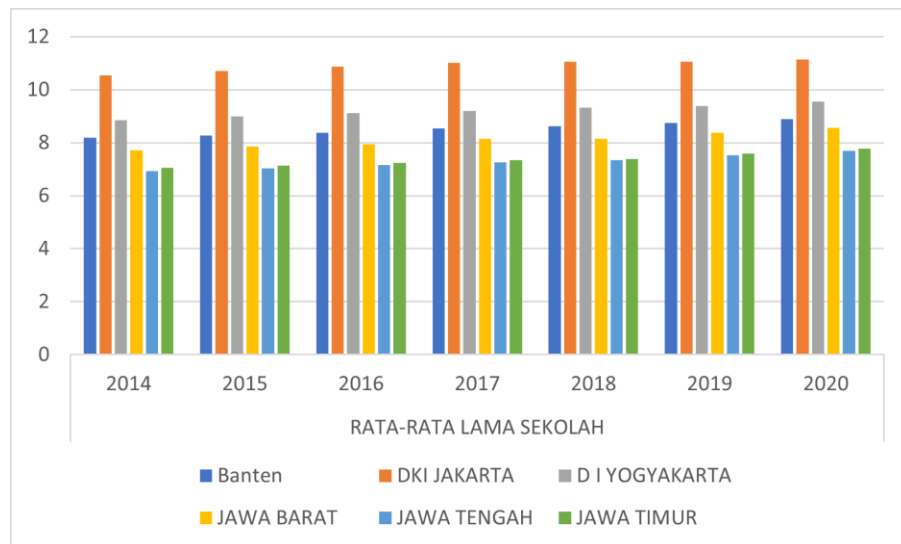
Pada gambar 1.3 menjelaskan bahwa angkatan kerja di Pulau Jawa mengalami fluktuasi. Angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat menduduki posisi teratas dibandingkan dengan provinsi lainnya. Diikuti oleh Provinsi Jawa Timur

dan Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), semakin tinggi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia (BPS, 2018). Diperkirakan tingkat partisipasi angkatan kerja kedepannya akan meningkat lagi dikarenakan setiap tahunnya yang masuk usia angkatan kerja akan bertambah dan tenaga kerja yang belum terserap sebelumnya belum juga mendapatkan pekerjaan, maka hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan untuk pengangguran yang ada.

Angkatan kerja yang cepat dan tidak diiringi dengan luasnya lapangan pekerjaan akan memperbesar jumlah pengangguran dan berdampak pada perekonomian. Ketidak seimbangan yang terjadi di pasar tenaga kerja akan menyebabkan pengangguran. Penelitian yang dilakukan (Filiyasi, 2021) angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Penelitian serupa dilakukan (Khotimah, 2018) juga mendapatkan hasil bahwa angkatan kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Farid, 2007) bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Tingkat pendidikan juga menjadi indikator yang harus diperhatikan. Menurut (Todaro, 2020) pasar tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang ditempuh para pekerja. Untuk menggambarkan kualitas suatu pendidikan di suatu wilayah yaitu dengan digunakannya rata-rata lama sekolah. (Hartanto, 2017) mengemukakan bahwa untuk tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah akan kesulitan memasuki dunia kerja yang membutuhkan

keahlian dan rata-rata lama sekolah minimal 12 tahun. Berikut merupakan tingkat presentase rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Jawa.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.4 Rata-rata Lama Sekolah di Pulau Jawa Tahun 2014-2020

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat secara keseluruhan tingkat rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa dikatan relatif tinggi. Dapat dilihat pada Provinsi DKI Jakarta dengan dengan presentase rata-rata sekolah tertinggi diantara Provinsi lainnya yang kemudian disusul dengan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Barat, sedangkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur berada diposisi bawah diantara Provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Penelitian (Setiawan, 2021) yang berjudul pengaruh angkatan kerja, upah, PDRB, dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2002-2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa angkatan kerja, upah dan PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran di

Provinsi Banten. Sedangkan pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Banten.

Penelitian (Suriati, 2020) yang berjudul pengaruh jumlah angkatan kerja, upah minimum, dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dan memiliki tingkat kemajuan pembangunan tertinggi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia terkonsentrasi di pulau jawa kekayaan sumber daya alam, angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, serta fasilitas pendidikan yang luas dan beragam menjadi salah satu alasan pemerintah menjadikan Pulau Jawa untuk mendorong pertumbuhan industri dalam jangka menengah maupun panjang, sehingga membuat Pulau Jawa memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan dengan wilayah lainnya. Alasan penulis menggunakan Provinsi yang ada di Pulau Jawa salah satunya untuk melihat seberapa optimal variabel lain dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menggunakan salah satu variabel yang masih jarang digunakan oleh penulis lain yaitu variabel Indeks

Pembangunan Teknologi dan Komunikasi (IP-TIK) sehingga penulis melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa jauh variabel IP-TIK, Angkatan Kerja, dan Rata-rata Lama Sekolah mempengaruhi variabel Tingkat Pengangguran Terbuka. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi dan Komunikasi, Angkatan kerja, dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa tahun 2012-2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh IP-TIK, angkatan kerja, dan rata-rata lama sekolah secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh IP-TIK, angkatan kerja, dan rata-rata lama sekolah secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh IP-TIK, angkatan kerja, dan rata-rata lama sekolah secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui pengaruh IP-TIK, angkatan kerja, dan rata-rata lama sekolah secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.

3. Untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan pendukung bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang penelitian khususnya mengenai pengangguran.

2. Manfaat Praktis

Secara teori penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai gambaran tentang pengaruh IP-TIK, angkatan kerja, dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka yang ada di Pulau Jawa, dan sebagai acuan untuk membuat kebijakan mengenai masalah pengangguran ini.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini peneliti telah melaksanakan penelitian pada Badan Pusat Statistik.

